



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2011-2012**

SELASA, 16 AGUSTUS 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2011**



**PIDATO KETUA DPR-RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2011-2012**

SELASA, 16 AGUSTUS 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2011**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
PIDATO KETUA DPR-RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2011-2012**

Selasa, 16 Agustus 2011

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang kami hormati,

- **Saudara Presiden Republik Indonesia,**
- **Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,**
- **Saudara Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPR-RI,**
- **Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPD-RI,**
- **Saudara Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-lembaga Negara,**
- **Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,**
- **Para Undangan dan hadirin yang kami mulikan,**

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat

menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 dalam keadaan sehat.

Agenda Rapat Paripurna DPR-RI siang hari ini, yang juga dihadiri oleh seluruh Anggota DPD-RI, adalah [1] **Pidato Ketua DPR-RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012**, dan [2] **Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2012 dan Nota Keuangan serta Dokumen Pendukung.**

Kehadiran DPD dalam agenda Sidang Paripurna siang hari ini mencerminkan spirit politik kenegaraan di dalam rangkaian kegiatan sidang bersama, yang telah dilaksanakan mulai tahun lalu, dan dalam rangka fungsi DPD-RI untuk memberikan pertimbangan pembahasan RAPBN sesuai UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 154.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal, telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak Anggota Dewan terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR-RI. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim**, izinkan kami membuka Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.***



Pada Sidang Paripurna pagi tadi, Presiden RI telah menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI. Kita semua, segenap bangsa Indonesia berkewajiban untuk memaknai arti kemerdekaan Republik Indonesia yang kini telah menginjak usia ke-66 sebagai "kelahiran kembali sebuah bangsa".

Proklamator Kemerdekaan RI Ir. Soekarno pernah mengatakan, bahwa kemerdekaan adalah "jembatan emas" bagi keberlangsungan suatu bangsa. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah titik kulminasi dari suatu perjuangan panjang selama 3,5 abad yang berhasil kita rebut dan kita raih dengan darah, keringat dan air mata. Untuk itu, kemerdekaan ini harus terus kita pertahankan.

Para pendiri bangsa bertekad untuk mendirikan suatu negara yang “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”, bertujuan untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan ini, segenap bangsa Indonesia memiliki komitmen dan tanggung jawab bersama, tidak hanya menata dan membangun demokrasi, tetapi harus tetap berusaha, mewujudkan stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi yang mampu memperkuat pondasi perekonomian nasional. Perekonomian yang tumbuh, diyakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kita juga harus terus menjaga aset terpenting dari kemerdekaan yang telah kita peroleh: **persatuan dan kesatuan bangsa**. Bagi kita, persatuan adalah kekuatan yang merupakan awal dari kebangkitan. Sejarah bangsa kita telah membuktikan, betapapun beratnya tantangan yang dihadapi, kita selalu berhasil mengatasinya dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan itulah, maka upaya-upaya yang mengarah pada

tindakan radikalisme, terorisme dan separatisme, merupakan bentuk pengingkaran pada cita-cita luhur bangsa kita.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.***

Sebelum kami menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Sidang I, sesuai dengan Tata Tertib DPR, ijinilah kami menyampaikan kepada Sidang Dewan yang terhormat 5 (lima) surat masuk yang diterima Pimpinan DPR. Tiga surat dari Presiden yaitu, surat tertanggal 25 dan 28 Juli 2011 perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Indonesia, tertanggal 26 Juli 2011 perihal penyampaian RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah. Satu surat dari Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, tertanggal 1 Agustus 2011 perihal Pengajuan Nama Calon Hakim Agung. Satu surat dari DPD-RI tertanggal 25 Juli 2011, perihal penyampaian 5 (lima) Keputusan DPD-RI.

Surat-surat ini akan diproses sesuai dengan prosedur dan mekanisme Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masa Persidangan I dibuka pada hari ini, 16 Agustus 2011 dan akan berlangsung sampai dengan 28 Oktober 2011. Pada Masa Sidang ini, Dewan akan melaksanakan 3 (tiga) fungsi utama Dewan, yaitu Fungsi Anggaran, Fungsi Legislasi dan Fungsi Pengawasan.

Dalam fungsi anggaran, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum UU APBN dilaksanakan, RUU APBN sudah harus disetujui menjadi UU. Dengan demikian, sebelum Penutupan Masa Sidang I pada bulan Oktober, RUU ini sudah harus disahkan menjadi UU.

RAPBN setiap tahun, disusun atas dasar asumsi makro ekonomi, didasarkan pada kondisi dan permasalahan nasional dan daerah dengan mempertimbangan kondisi perekonomian dunia. APBN merupakan tanggapan Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk menjawab tantangan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Secara konstitusional, fungsi anggaran adalah sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

Amanat konstitusi juga menegaskan perlunya percepatan pembangunan di daerah, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata melalui kebijakan desentralisasi, dengan prinsip rekognisi atas ciri dan keragaman daerah.

APBN juga ditujukan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat yang tersebar di seluruh daerah. Dengan demikian, maka politik anggaran menuntut rumusan konseptual pengelolaan anggaran yang jelas dan terukur, serta dapat memberikan kepastian bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Proses penyusunan RAPBN Tahun 2012 telah didahului melalui mekanisme Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2012, yang telah dibahas oleh DPR dan Pemerintah pada Masa Persidangan IV yang lalu, sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundangan dan Tata Tertib DPR. Dalam Pembicaraan Pendahuluan tersebut, Dewan telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012 sebagai pedoman dalam penyusunan APBN tahun 2012, antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi 6,6 - 7 persen;
- Inflasi disepakati 4 – 5,3 persen;

- Nilai tukar Rupiah 8.600,00 - 9.100,00 per dolar Amerika Serikat;
- Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan 5,5 - 6,75 persen;
- Produksi minyak bumi (*lifting*) sebesar 950.000 - 970.000 barel per hari; dan
- Harga patokan minyak bumi Indonesia 75,0 - 95,0 dolar Amerika Serikat per barel.

Dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2012 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, Dewan dan Pemerintah telah sepakat mengambil tema pokok: **Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat**. Dewan menekankan kepada Pemerintah agar memperluas partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk melibatkan unsur swasta dan BUMN, bersama Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam pencapaian sasaran pembangunan, sepanjang tahun 2012 hendaknya difokuskan melalui **strategi empat jalur**, yaitu mendorong pertumbuhan (*pro growth*), memperluas kesempatan kerja (*pro job*), menanggulangi kemiskinan (*pro poor*), serta merespon dan memitigasi perubahan iklim (*pro environment*).

Dari hasil pembahasan, telah disepakati 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu [1] Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, [2] Pendidikan, [3] Kesehatan, [4] Penanggulangan Kemiskinan, [5] Ketahanan Pangan, [6] Infrastruktur, [7] Iklim Investasi dan Iklim Usaha, [8] Energi, [9] Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, [10] Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik dan [11] Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Sedangkan 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu: [1] Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, [2] Bidang Perekonomian dan [3] Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Dari prioritas tersebut, ada beberapa prioritas penting yang menjadi perhatian serius Dewan, antara lain:

- Reformasi birokrasi:

Prioritas ini diarahkan untuk memantapkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik, melalui terobosan kinerja terpadu, akuntabel, taat kepada hukum, transparan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pusat dan Daerah.

- Pendidikan:

Prioritas pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas,

terjangkau, relevan dan efisien, kemandirian, keluhuran budi pekerti, karakter bangsa yang kuat, serta kewirausahaan.

- **Kesehatan:**

Diberikan catatan bagi arah kebijakan yang perlu diambil yaitu peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan, dokter, bidan dan perawat di puskesmas dan rumah sakit kabupaten/kota. Mengupayakan penambahan kegiatan prioritas nasional sehingga mencakup kegiatan pelayanan kesehatan jiwa di daerah/kawasan pasca bencana dan konflik. Meningkatkan harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran MDGs tahun 2015.

- **Penanggulangan Kemiskinan:**

Diantaranya adalah penanganan pelayanan masyarakat miskin di daerah pesisir, pulau-pulau terpencil, daerah tertinggal, daerah terdepan, daerah perbatasan, daerah terluar dan daerah pasca bencana dan daerah pasca konflik yang akan dituangkan dalam sasaran dan indikator kegiatan prioritas. Perlu kebijakan yang progresif yang diarahkan bagi penyelesaian masalah pada sisi hulu kemiskinan. Perlu dipahami bahwa kemiskinan berakar dari kemiskinan

perdesaan dan pertanian. Untuk itu, perlu kebijakan berkelanjutan dalam pembangunan pedesaan dan sektor pertanian khususnya.

- **Ketahanan Pangan:**

Meningkatkan ketersediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri dan pengendalian impor bahan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Yang lebih penting bahwa, dari program ini adalah adanya akses rakyat miskin terhadap pangan tersebut dengan harga yang terjangkau.

Kebijakan Umum Fiskal tahun 2012 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan 2012, yakni dalam bentuk: peningkatan pertumbuhan ekonomi; pengurangan tingkat pengangguran menjadi 6,4 - 6,6 persen dan tingkat kemiskinan menjadi 10,5 -11,5 persen; dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi, upaya yang dilakukan antara lain: (1) mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi di daerah melalui pengembangan koridor ekonomi; (2) membangun infrastruktur yang mendukung terwujudnya keterhubungan antar wilayah; dan (3) mendorong percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Arah kebijakan fiskal tahun 2012 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun 2012, antara lain (1) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah; (2) Menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan Pemerintah; (3) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (4) Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah; dan (5) Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik.

Dalam rangka pembiayaan, Dewan mengharapkan agar Pemerintah bekerja lebih keras, dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor kebijakan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai dalam tahun 2012 dengan meningkatkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah ada, mendukung optimalisasi pendapatan negara dan mendukung kegiatan ekonomi termasuk dalam pemberian insentif fiskal. Pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap elastisitas pajak yang dipandang masih relatif rendah, dengan menerapkan kebijakan pembatasan transaksi secara tunai (*cash*). Dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, Pemerintah diminta

bertindak tegas untuk mengatasi penanganan piutang pajak yang semakin besar.

Selain itu dari sisi penerimaan SDA Migas, Dewan mendukung Pemerintah agar dapat mengatasi tantangan dalam meningkatkan *lifting* minyak mentah yang disebabkan produksi alamiah, fasilitas produksi yang kurang mendukung serta kendala pemberian izin lokasi dan pembebasan lahan. Optimalisasi penerimaan minyak dan gas bumi tahun 2012 akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kesinambungan produksi dan kelestarian lingkungan hidup.

Dari sisi belanja negara, Dewan memberikan dukungan penuh bagi peningkatan kesejahteraan para abdi negara, dimana dalam tahun 2012, kebijakan Belanja Pegawai antara lain terdapat kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 10 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, serta menampung kebutuhan anggaran remunerasi Kementerian/Lembaga terkait reformasi birokrasi. Kebijakan remunerasi hanya merupakan bagian kecil dalam tahapan reformasi birokrasi, yang diinginkan masyarakat tentunya perubahan lebih besar, mendasar dan menyeluruh terhadap perilaku abdi negara di seluruh tingkatan.

Permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan subsidi BBM dan LPG Bersubsidi dalam tahun 2012, Pemerintah

diharapkan konsisten melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Pengendalian ini dilakukan melalui penyaluran secara tertutup dan bertahap sesuai target sasaran serta penyempurnaan regulasi; melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg; meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan energi terbarukan; meningkatkan pengawasan lebih ketat terhadap volume BBM bersubsidi yang didistribusikan kepada masyarakat dan pengaturan tata niaga BBM; serta penindakan dan pencegahan terhadap penyalagunaan BBM bersubsidi. Dewan mengingatkan, agar Pemerintah tegas menangani BBM bersubsidi, karena hingga kini belum ada langkah konkret yang dilakukan.

Kebijakan subsidi listrik tahun 2012, ada kesepakatan antara lain: agar penyediaan tenaga listrik dilakukan secara efisien dan berkelanjutan antara kepentingan penyedia listrik (PLN) dan konsumen; pemberian subsidi listrik kepada golongan pelanggan yang lebih tepat sasaran dengan didukung kebijakan tarif; optimalisasi bauran energi (*energy mix*) untuk bahan bakar terutama dengan cara menurunkan penggunaan BBM, serta menjamin dan menjaga ketersediaan pasokan gas bumi, batu bara, dan jenis energi lainnya.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.***

Penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui kebijakan desentralisasi sebagai konsensus politik nasional cukup banyak kemajuan, namun masih banyak juga persoalan yang kita temukan. Persoalan yang muncul, utamanya berkaitan dengan masalah hubungan Pusat dan Daerah, terkait dalam hal fiskal dan anggaran. Selain itu, pelaksanaan Otonomi Daerah juga masih terkendala pada penataan daerah atau penataan manajemen unit Pemerintahan Daerah. Misalnya, pemekaran daerah, wilayah perbatasan, penataan ruang wilayah, serta dalam hal tata kehidupan masyarakat.

Keberhasilan Otonomi Daerah sangat tergantung kepada kepemimpinan di daerah. Di samping koherensi politik, faktor kualitas kepemimpinan eksekutif daerah menjadi faktor yang penting. Dalam kaitan ini, kita berpendapat bahwa sudah waktunya Dewan dan Pemerintah membahas RUU Pemilukada, agar proses demokrasi di daerah dapat berjalan baik dan menghasilkan kepala daerah yang kompeten.

Aspek lain yang juga sangat penting adalah menyangkut infrastruktur. Pada akhir Mei 2011 yang lalu, Presiden

melakukan *launching Master Plan* Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan 6 (enam) koridor percepatan pembangunan nasional. Faktor kunci keberhasilan MP3EI, utamanya terletak pada infrastruktur dan aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi. Infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat vital, sebagai pendukung utama pembangunan daerah, dan untuk dinamika aktifitas ekonomi di Pusat dan di Daerah.

Kelemahan dukungan infrastruktur juga dapat mengakibatkan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan mengalami kelangkaan fasilitas, terutama bila dibandingkan negara tetangga. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan lebih intens meningkatkan agenda kerja Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dalam menggiatkan pembangunan di wilayah perbatasan.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.***

Telah kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan daerah dengan berbagai permasalahan dan solusinya. Kita meminta perhatian

tentang masalah jaminan sosial bagi rakyat Indonesia, utamanya pada saat Dewan sedang melakukan pembahasan mengenai RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS).

Peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik di bidang kesejahteraan, merupakan tuntutan negara kesejahteraan dalam memberikan perlindungan kepada segenap bangsanya. Dasar Negara Pancasila, telah mengamanatkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hampir setengah jumlah penduduk Indonesia masih terhimpit kemiskinan. Keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya, menjadi mutlak dilakukan.

Memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, sebenarnya menjadi kewajiban setiap negara. Dalam UUD 1945 Pasal 28 H (amandemen kedua) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat. Sementara pada Pasal 34 ayat (2) (amandemen keempat) dinyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan.

DPR memiliki tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam mendorong lahirnya kebijakan yang menyangkut pemberian jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Pembahasan RUU BPJS merupakan keinginan dan keseriusan DPR dengan seluruh fraksi, untuk memberikan jaminan sosial, dalam bentuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, jaminan hari tua dan pensiun didalam UU yang akan segera diselesaikan.

Kita semua menyadari, masih banyak yang harus diperjuangkan untuk mencapai cita-cita Proklamasi setelah 66 (enam puluh enam) tahun kemerdekaan. Untuk alasan itulah, DPR menyampaikan tekad mendukung penyelesaian secepatnya RUU BPJS, mengingat dampaknya yang besar dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi rakyat yang hidup jauh dari sejahtera dan rawan dari ancaman penyakit.

Dewan segera menuntaskan beberapa RUU yang sangat penting untuk diselesaikan, antara lain RUU tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RUU tentang Perubahan Atas UU tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Rumah Susun, RUU tentang Bantuan Hukum dan beberapa RUU lain yang siap memasuki pembicaraan tingkat II. Beberapa RUU yang lain, seperti RUU

tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Paket RUU Bidang Politik akan diselesaikan sesuai prioritas.

Agenda tahun sidang ini pun DPR sedang membahas RUU Intelijen dan akan membahas RUU Keamanan Nasional. Dua subjek RUU ini substansinya akan merangkum pada satu tujuan, yaitu sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. UU ini hadir untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dengan banyaknya persoalan yang dihadapi bangsa, seperti terorisme, konflik horizontal, dan gejala adanya konflik vertikal, yang membutuhkan langkah-langkah strategis melalui payung hukum.

Dalam satu Tahun Sidang DPR 2010-2011, telah diselesaikan 17 (tujuh belas) RUU dan 3 (tiga) RUU Kumulatif Terbuka. DPR juga telah menyetujui RUU tentang Penanganan Fakir Miskin menjadi Undang undang. Diselesaikannya RUU tentang Fakir Miskin yang merupakan RUU inisiatif DPR, menunjukkan perhatian Dewan yang sangat besar terhadap nasib fakir miskin. Dengan UU ini diharapkan, Pemerintah dan pihak pihak terkait dapat menangani masalah fakir miskin dengan sebaik-baiknya.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) telah menetapkan berbagai prioritas RUU untuk diselesaikan Dewan dan Pemerintah. Ada banyak hal yang menjadi kendala dalam

pembahasan RUU, utamanya penyamaan pendapat antara DPR dan pemerintah dalam hal substansi yang krusial. Untuk itulah, Pimpinan Dewan melakukan serangkaian langkah untuk mengoptimalkan fungsi perundang-undangan. Keterlibatan Pimpinan Dewan dalam ikut menangani langsung beberapa RUU, konsultasi yang dilakukan secara intensif dengan fraksi-fraksi dan alat kelengkapan Dewan yang menangani RUU, dan bahkan konsultasi dengan Presiden, telah dilakukan. Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk mencari titik temu terhadap substansi yang krusial. Kedepan, diharapkan pelaksanaan fungsi ini benar-benar lebih intensif dilakukan, mengingat baik lembaga DPR maupun Pemerintah telah sepakat membentuk wakil yang akan menjadi *focal point* di masing-masing lembaga bagi pelaksanaan fungsi perundang-undangan.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.***

Pada masa sidang yang lalu banyak permasalahan yang menjadi perhatian Dewan, seperti masalah penegakan hukum. Dewan prihatin atas masih maraknya tindak pidana korupsi yang belum berhasil ditangani secara tuntas. Korupsi telah merugikan

keuangan negara dan menjadi hambatan bagi upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dewan senantiasa berharap agar lembaga penegak hukum dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Dalam kaitan ini, Dewan sedang menunggu usulan dari Presiden untuk menyampaikan nama-nama calon Pimpinan KPK, yang selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Hasil dari uji kelayakan dan kepatutan ini, diharapkan menghasilkan Pimpinan KPK yang kredibel, kapabel, jujur, berani, memiliki komitmen moral dan integritas yang tinggi, dan ikhlas bekerja untuk bangsa dan negara.

Dewan juga berharap, pemberantasan korupsi tidak hanya terfokus pada peran Lembaga Penegak Hukum, tetapi juga dicari solusi yang lebih cerdas yang dapat mengurangi ruang bagi Penyelenggara Negara untuk melakukan korupsi.

Masalah mafia Pemilu juga menjadi perhatian Dewan. Panja Mafia Pemilu telah bekerja efektif mengungkap terjadinya pelanggaran hukum dan pelanggaran nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu. Panja ini masih terus bekerja dan melanjutkan tugas dalam masa sidang ini, agar ke depan Pemilu dapat dilaksanakan secara jujur, adil dan bertanggung jawab.

Pemilukada di Papua Barat yang rusuh dan menelan korban jiwa, menjadi keprihatinan kita bersama. DPR-RI meminta kepada semua pihak untuk dapat menahan diri, hendaknya tidak dikotori dengan aksi mobilisasi rakyat dan tindakan anarki, sehingga menghancurkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Para kandidat Kepala Daerah tidak boleh membenturkan rakyatnya, hanya untuk kepentingan kekuasaan belaka.

Isu politik di Papua yang terakumulasi disuarakannya referendum, memerlukan dialog antara masyarakat Papua dan Pemerintah untuk melaksanakan amanat UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah penyelesaian melalui cara-cara pembinaan yang intensif antara Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan pembinaan masyarakat Papua dan Papua Barat secara menyeluruh. Dialog dilakukan dalam rambu-rambu dasar NKRI.

Dalam pembinaan, aspek utama yang harus diperhatikan adalah aspek kesejahteraan, keadilan dan penegakan hukum, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin terbangun.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.***

Jika tadi yang saya sebutkan terdahulu adalah hal-hal yang menjadi perhatian Dewan di dalam negeri, maka Dewan pun menaruh perhatian terhadap perkembangan politik regional dan internasional terkait dengan kepentingan politik Indonesia. Hasil-hasil positif Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Jakarta pada awal Mei tahun ini, memberikan kepercayaan dari para kepala negara ASEAN kepada Indonesia untuk mengetuai ASEAN tahun ini. Dua isu penting yang ditangkap adalah masalah ancaman kecukupan pangan dan ketahanan energi, juga masalah perubahan iklim. Berbagai konferensi yang dilakukan di Indonesia, termasuk pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-44 yang dihadiri Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dan Menteri Luar Negeri Rusia di Bali, merefleksikan keinginan kuat yang ditunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah bagi kemajuan komunitas ASEAN 2015.

Indonesia sebagai Ketua ASEAN memastikan, dapat mendorong kemajuan yang berarti bagi pembangunan komunitas ASEAN, kawasan regional yang ditandai dengan perdamaian, kemajuan ekonomi dan kesejahteraan, dan secara

aktif ikut serta menanggapi tantangan global menuju pada kemakmuran dan stabilitas dunia.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.***

Demikian hal-hal yang menjadi perhatian Dewan. Sebelum kami mempersilahkan Saudara Presiden untuk menyampaikan Pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2012 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukung, izinkanlah saya meminta perhatian Pemerintah untuk dua hal berkenaan dengan akan datangnya Hari Raya Idul Fitri. *Pertama*, berkaitan dengan harga-harga kebutuhan pokok. *Kedua*, penyediaan infrastruktur transportasi menjelang dan setelah mudik lebaran.

Sekarang ini harga kebutuhan pokok hampir di seluruh wilayah mengalami kenaikan, terutama harga beras. Sebaiknya, Pemerintah fokus menjaga stok pangan yang cukup, dengan harga terjangkau. Dipastikan bahwa stok pangan masih dalam kondisi aman. Tentang infrastruktur transportasi, baik darat, laut dan udara, agar ditangani dengan sebaik-baiknya, dan dalam kondisi siap untuk melayani arus penumpang. Masyarakat kita

masih mengagungkan nilai-nilai tradisi silaturahmi kepada orang tua, saudara dan kerabat, yang diwujudkan dalam budaya mudik. Untuk itu, kepada aparat keamanan dan petugas kementerian perhubungan, agar meminimalisir jumlah kecelakaan sebagai akibat dari tingginya arus mudik dan arus balik.

Sebagai refleksi, tahun lalu telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 643 kasus dengan 128 jiwa meninggal dunia, 165 jiwa luka berat, dan 325 luka ringan. Kami memberi dukungan, adanya rencana pemerintah untuk menyiapkan angkutan mudik gratis untuk pengendara sepeda motor dengan kapal laut, kapal api dan truk. Kebijakan ini akan dapat meminimalisir jumlah kecelakaan.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.***

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukung.

Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan:

PIDATO PRESIDEN RI

Demikianlah, telah kita ikuti bersama Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya. Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Presiden.

Selanjutnya, kami minta kesedlaan saudara Drs. Achmad Basarah, MH. dari Fraksi PDI-Perjuangan, untuk membacakan doa. Kami persilahkan.

Doa oleh Anggota Dewan

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Drs. Achmad Basarah, MH. yang telah memimpin doa.

Dengan telah selesainya Pidato Presiden Republik Indonesia dan pembacaan doa, maka telah selesailah seluruh acara Rapat Paripurna Dewan siang hari ini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Pimpinan lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Anggota DPR dan Anggota DPD-RI, dan hadirin semua yang telah memberikan perhatian dan dukungan,

sehingga memungkinkan Rapat Paripurna DPR siang hari ini berjalan dengan tertib dan lancar.

Dengan mengucapkan syukur **Alhamdulillah Rabbil 'Alamin**, kami menutup Rapat Paripurna siang hingga sore hari ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 16 Agustus 2011

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

Dr. H. MARZUKI ALIE